

Warga Miskin Tidak Terima Bansos

**PURWOREJO (KR)** - Sejumlah warga miskin di Desa Kalirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo tidak mendapat bantuan sosial (Bansos), atau ada yang menerima namun dihentikan karena dalam daftar masuk dalam daftar warga yang sudah meninggal. Padahal yang bersangkutan masih hidup.

"Selama muncul kasus Korona ini, sudah tiga kali pembagian bansos atau sembako kepada warga, namun ada yang hanya menerima tahap pertama dan tahap berikutnya tidak menerima. Ada pula yang menerima pada tahap satu an dua, sedang tahap tiga sudah tidak menerima," kata Sigit, salah seorang warga setempat, Selasa (16/6).

Menurutnya, setelah ditelusur hingga kecamatan, warga yang tidak lagi menerima bantuan itu ternyata dinyatakan sudah meninggal dunia, diantaranya Ny Sutarningsih warga Rt 06/Rw 02, Muhalim S Kadi Rt 01/ Rw 01, Ny Siti Paryatun Rt 05/Rw 01, Ny Sri Ratna Rt 09/Rw 01 serta Ny Taslimah warga Rt 02/Rw 02, dan dimungkinkan masih ada warga lain yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak menerima bansos.

Menanggapi ketidakberesan daftar warga ini, akhirnya diadakan pertemuan warga, aparat desa serta pihak kecamatan. Termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang bertanggungjawab pada program bansos ini. Pupun Cahyanto dari TKSK Bagelen mengaku, jika ada kesalahan imput data yang masuk padanya.

"Kepada yang bersangkutan dan pihak desa, secara lisan kami sudah minta maaf dan data akan segera diperbaharui," katanya. Kesalahan ini katanya, murni karena kelalaian sehingga nama yang bersangkutan masuk dalam daftar yang tidak semestinya. IKami langsung klarifikasi ke desa, dan memang ada kesalahan dalam imput data," tandasnya. (Nar)-a

Kampung Siaga Covid-19 Pemuda Tri Tunggal

**KLATEN (KR)** - Pemuda Dukuh Tombol Tri Tunggal RT 01, 02, 03 / RW 03, Desa Kiringan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten secara swadaya mendirikan Kampung Siaga Covid-19.

Langkah ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketua Pemuda Dukuh Tombol Tri Tunggal, Muklis Harsono, mengatakan, pendirian Kampung Siaga Covid-19 bermula dari gagasan pemuda yang ingin mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, khususnya di Dukuh Tombol.

"Dari awal pemuda telah melakukan beberapa kegiatan, seperti penyuluhan tentang Covid-19 dari rumah ke rumah. Selanjutnya penyemprotan disinfektan setiap dua pekan sekali. Dari kegiatan ini muncul kesadaran dari warga mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Muklis di sela acara peresmian Kampung Siaga Covid-19, Senin (15/6).

Kampung Siaga Covid-19 Dukuh Tombol Tri Tunggal, Desa Kiringan diresmikan oleh Camat Tulung, Suyamto, bersama jajaran Muspika dan Pemerintah Desa Kiringan.

Kampung ini memiliki fasilitas tempat cuci tangan di setiap rumah serta rumah isolasi bagi warga yang pulang dari rantau. Kepala Desa Kiringan, Narwan Surana, mengatakan, pendirian Kampung Siaga Covid-19 merupakan swadaya warga Dukuh Tombol Tri Tunggal. Pemerintah Desa Kiringan tidak mengeluarkan anggaran sedikitpun.

Camat Tulung, Suyamto, mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan warga Dukuh Tombol Tri Tunggal yang peduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan sehingga terbentuklah Kampung Siaga Covid-19.

Upaya ini sekaligus sebagai persiapan menuju kenormalan baru (new normal). "Di Kecamatan Tulung ada dua Kampung Siaga Covid-19 yang sudah diresmikan, yakni di Dukuh Tombol Tri Tunggal, Desa Kiringan dan Dukuh Selab, Desa Kemiri. Diharapkan bisa ditiru kampung yang lain," ujarnya.

Ps Kapolsek Tulung, Iptu Jaka Waluyo, mengatakan, kondisi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga harus bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan agar virus Korona tidak menyebar.

Salah satu upaya yakni membentuk Kampung Siaga Covid-19. "Warga Dukuh Tombol Tri Tunggal dari awal pandemi sampai saat ini masih siaga dalam melaksanakan antisipasi penanggulangan Covid-19 dengan penjagaan 24 jam. Sehingga bisa memantau aktivitas warga. Ini perlu diapresiasi," ujarnya. (Lia)-a

PGN Luncurkan Sapta Program Gasifikasi Nasional (1)

**JAKARTA (KR)** - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai bagian dari sub holding gas Pertamina berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas bumi dalam rangka merealisasikan peran sebagai penyangga atau agregator gas bumi nasional. Hal itu di-

sampaikan Direktur Utama PGN Suko Hartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6).

Dikatakan peran sebagai agregator gas bumi nasional terlihat dari pengelolaan 96% persen infrastruktur gas bumi dan 92% pangsa pasar kegiatan niaga gas bumi. Bukti lain, kini PGN telah



GROBOGAN BERSEMI



**GROBOGAN (KR)** - Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM minta semua warga yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya warga kurang mampu, bisa mendapat bantuan sosial (bansos). Ia minta para kepala desa (Kades) untuk mendata warganya dengan teliti dan cermat, jangan sampai ada warga yang tercecer sehingga tidak bisa tercover menerima bansos.

"Tetapi perlu dicatat, warga kurang mampu hanya mendapatkan satu jenis bantuan. Tidak bisa mendapat bantuan doble dari program bantuan lainnya," tegasnya didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs H Teguh Harjokusuma MSI, Selasa (16/6). Disebutkan, ada bebe-

rapa jenis bansos. Di antaranya melalui program sembako atau Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan dari Pemprov Jateng, Pemkab Grobogan dan dari pemerintah desa dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Diakui, banyak laporan dari warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan. Menurutnya, warga kurang mampu yang tidak mendapat bansos akan dicover oleh pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa. Di mana dalam penanganan Covid-19, sebanyak 30 persen Dana Desa 30 persen digunakan untuk masyarakat terdam-

pak pandemi Covid-19.

Berdasarkan data, total jumlah warga yang mendapatkan bansos di daerahnya ada 484.627 KK, atau 73.86 persen dari keseluruhan KK di Kabupaten Grobogan. Diakuinya, penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 tidak bisa dilakukan serentak karena proses pendataan dan validasi data juga butuh waktu.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Grobogan Dr Sunanto SST MP menambahkan, ada sembilan kriteria yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Antara lain, karyawan yang dirumahkan atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja jasa

transportasi, pemudik yang pulang kampung karena pekerjaan di kota tempat bekerja tutup.

Kemudian, pekerja UMKM yang menutup usahanya, buruh serabutan, pekerja rumah makan yang terdampak, PKL yang menutup tempat usahanya, pekerja seni, dan pekerja lainnya. Adapun yang masuk kategori pekerja lainnya ini seperti penyandang di-

sabilitas, buruh tani dan pembantu rumah tangga.

"Pendataan yang kami lakukan mengacu data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan. Setelah itu, kami validasi sesuai kriteria penerima bantuan. Setelah itu, data tersebut masih kami sandingkan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ungkapnya.

(Tas)-a



KR-M Taslim

Bupati Grobogan menyerahkan bansos kepada warga terdampak Covid-19.

PEMELIHARAAN JALAN DAN JALUR EVAKUASI  
Pemkab Klaten Anggarkan Dana Rp 18 Miliar

**KLATEN (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyiapkan anggaran Rp 18 miliar untuk pemeliharaan jalan. Ini berarti, terjadi peningkatan Rp 8 miliar dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp 10 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DP-UPR Kabupaten Klaten Suryanto, Senin (15/6) mengemukakan, salah satu prioritas adalah pemeliharaan jalur evakuasi Merapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang.

"Anggaran pemeliharaan ruas jalan yang semula 10 Miliar kini ditingkatkan menjadi Rp 18 Miliar. Penambahan Rp 8 Miliar tersebut akan dialokasikan untuk pemeliharaan ruas jalan yang su-

dah direncanakan, namun tertunda pelaksanaannya. Selain itu juga untuk jalan yang merupakan jalur evakuasi," Suryanto. Berkaitan pengusulan dana untuk pemeliharaan jalur evakuasi, beberapa nilai yang diajukan terbilang cukup besar bila dibandingkan ruas jalan pada umumnya. Tentunya setelah dilakukan perencanaan matang dengan melihat kondisi yang ada.

Ruas jalan sekaligus jalur eva-

kuasi yang diusulkan untuk pemeliharaan diantaranya berada di daerah Kecamatan Kemalang dan beberapa daerah lainnya.

Pernyataan ini sekaligus memberi kepastian sikap pemerintah terkait video viral di media sosial tentang kerusakan jalur evakuasi Merapi yang dilalui truk pengusung pasir.

Berkaitan dengan proyek peningkatan ruas jalan, Suryanto mengatakan, dari 18 proyek peningkatan ruas jalan yang sedianya dilakukan tahun ini, hanya ada 5 proyek yang bisa dikerjakan.

Hal ini disebabkan anggaran proyek tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Klaten.

"Sejumlah ruas jalan yang urung dilakukan peningkatan akan dilakukan pemeliharaan secara maksimal. Jika usulan ini nantinya disetujui dan ditetapkan, diperkirakan akan dikerjakan mulai bulan Agustus-September," jelas Suryanto pula.

Menurut Suryanto, sebanyak18 proyek peningkatan ruas jalan tersebut sebelumnya dianggarkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun melihat situasi Kabupaten Klaten dalam status kejadian luar biasa atau KLB Covid-19, maka anggaran untuk proyek infrastruktur tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19. (Sit)-a



KR-Sugeng Irianto

Suasana penjurian ajang Pilmapres Undip.

**SEMARANG (KR)** - Universitas Diponegoro (Undip) melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Biro Administrasi Kemahasiswaan, Semarang 8-11 Juni 2020 menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi (Pilmapres) tahun 2020 yang diikuti 15 peserta (program sarjana) dan 5 peserta (program diploma).

Terpilih sebagai Juara I Program Sarjana Amanda Margareth Inganta Seba-

yang (Fakultas Teknik, Angkatan 2017) dan Juara I Program Diploma Enrico Fendy Sapatra (Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Fakultas Sekolah Vokasi, Angkatan 2017).

Direktor Kemahasiswaan Drs Handoyo Djoko Waluyo MSI didampingi Ketua tim juri Susatyo Nugroho Widyo Pramono ST MM dan Fahmi Arifan ST MEng (Juri Gagasan Kreatif Program Diplo-

ma), Selasa (15/6) menyatakan aspek yang dinilai dalam Pilmapres di antaranya Kemampuan Bahasa Inggris, Wawasan Kebangsaan, Portofolio Kegiatan Kemahasiswaan yang Diunggulkan (pengalaman menjuarai lomba, mengikuti kegiatan ilmiah/seni/olahraga dan kepemimpinan).Juga aspek Gagasan Kreatif (karya tulis dengan topik berupa solusi atas masalah pembangunan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals

(SDGs) dan Revolusi Industri 4.0).

"Juara I program Sarjana dan Juara I Program Diploma akan mewakili Universitas Diponegoro pada Pilmapres tingkat nasional Juni ñ September 2020. PilmapresUndip 20-20 dilaksanakan dengan metode penilaian on desk, presentasi dan diskusi secara online menggunakan Microsoft Teams," ujar Ketua Tim Juri Susatyo Nugroho Widyo Pramono ST MM.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WR

I) Undip Prof Budi Setiyono SSos MPol Admin PhD menyampaikan Undip melakukan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai macam program dan tahapan. Mulai dari seleksi siswa berprestasi, survey minat bakat pada saat penerimaan mahasiswa baru, pembinaan karakter yang berjenjang, pengelolaan pusat prestasi mahasiswa, pembinaan UKM dan ormawa, pemberian subsidi kegiatan, pembinaan karir, serta pemberian insentif prestasi. (Sgi)-a

## Mimbar Legislatif

### Pemprov Jateng Ajukan Revisi Perda PKB

**PEMERINTAH** Provinsi (Pemprov) Jateng mengajukan rencana kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) dan Merubah /menurunkan CC serta menaikkan Tarif Progresif kepemilikan kedua dan seterusnya. Pengajuan perubahan yang diajukan pada 3 Juni 2020 dalam sidang paripurna, merupakan pengajuan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jateng.

Rencana revisi Perda ini prosesnya sudah sangat panjang, yaitu sebelum ada musibah Covid-19, sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020 melalui pembahasan panjang oleh Bapemperda dan eksekutif, saat ini sudah sampai di DPRD, Insha Allah kita bahas sesuai kondisi kekinian.

Ada dua alasan pemerintah provinsi mengajukan revisi perda ini, yakni ketimpangan Tarif kendaraan pribadi antar provinsi dan upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Empat provinsi di Jateng sudah lebih tinggi dari Jateng, DKI Jakarta 2% sejak 2015, Jabar, Jatim , Banten 1,75% sejak 2013 sedangkan Jateng masih 1,5%. Selain itu perlu ada pembatasan penggunaan roda dua di Jateng.

Substansi dari revisi perda tersebut menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor dari

1,5 % menjadi 1,75%. Selain itu menurunkan CC kendaraan yang terkena pajak progresif kepemilikan dari 200cc menjadi 150cc dan menaikkan besarnya sebesar 0,25% di setiap kategori. Asumsinya ada 9,3 juta kendaraan bermotor di Jateng, dengan rincian dibawah 150 cc 8,1 Juta, antara 150-200 cc : 1,1 juta dan diatas 200cc sebesar 109 ribu kendaraan. Kenaikan pajak yang akan terkumpul dari masyarakat sebanyak Rp 300 miliar. Semua masih dalam bentuk draf, kami mohon masukan dari seluruh masyarakat, tentang substansi revisi maupun waktu revisi.

Pemprov Jateng dan DPRD sadar betul dengan kondisi masyarakat yang sedang terdampak ekonominya akibat Covid 19. kami sadar kondisi ekonomi sedang tidak baik, bahkan kami sedang menyiapkan APBD 2021 berupa APBD pertolongan, yaitu APBD yang sebagian anggarannya akan digunakan untuk membantu kehidupan kembali perekonomian yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Untuk itu Dewan mohon masukan dari masyarakat. (\*)-a

(Disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)